



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG
PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG**

Jalan Lintas Sumatera KM. 4 Sungai Kambut Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat
www.pn-pulaupunjung.go.id, pn.pulaupunjung@gmail.com

**SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG**

TAHUN ANGGARAN 2025
Nomor : 04/PL-Kons-PBH/XII/PNPLJ/2024

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan ini Pengadilan Negeri Pulau Punjung membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Pos bantuan Hukum

(POSBAKUM) Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Umum

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum
Lingkup Pekerjaan : Pemberi Layanan Bantuan Hukum
Lokasi Pekerjaan : Pengadilan Negeri Pulau Punjung
Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM.4 Sungai Kambut
Pulau Punjung Kab. Dharmasraya Sumbar
Nilai Total HPS : Rp28.000.000,00
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Negeri Pulau Punjung Tahun
Anggaran 2025

B. Formasi Penerimaan

1. Penyedia Jasa pada Pos Bantuan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum dan/atau unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultansi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi;
2. Telah memiliki surat pengesahan pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
3. Telah terakreditasi sebagaimana SK Menteri Hukum dan HAM;
4. Memiliki Kantor/Cabang/Perwakilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
5. Bersedia memberikan jasa layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung selama tahun anggaran 2025 dan sesuai jam kerja pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
6. Petugas pada Pos Bantuan Hukum adalah Advokat, S1 Hukum atau Sarjana Hukum Islam, yang menguasai Hukum dan Memiliki staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana

7. Petugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan dan tidak boleh berganti sampai akhir masa kontrak;
8. Penyedia telah terdaftar dalam Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia .)

C. Persyaratan

1. Mengajukan surat penawaran yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung UP. Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2025 Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Penyedia telah terdaftar dalam APLIKASI SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia);
3. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi;
4. Telah terakreditasi oleh Kemenkumham RI;
5. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor;
6. Surat keterangan Domisili Lembaga;
7. Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum;
8. Menyediakan minimal 2 orang petugas bantuan hukum di setiap ruang sidang;
9. Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga;
10. Melampirkan Bukti Setor Pajak Tahunan (SPT) 5 Tahun terakhir;
11. Membuat surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas;
12. Tidak masuk dalam daftar hitam;
13. Bersedia mengikuti Tes Kompetensi;
14. Bersedia menandatangani pernyataan tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi;
15. Bersedia tunduk pada aturan dan ketentuan Pengadaan Jasa Posbakum di Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

D. Pendaftaran, Waktu dan Tempat

1. Pemasukan Dokumen Penawaran : 16-12-2024 s.d 19-12-2024
2. Berkas Penawaran dan Lampirannya
ditujukan kepada : Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung
UP. Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2025
Pengadilan Negeri Pulau Punjung
3. Calon Penyedia mendaftar pada LPSE Mahkamah Agung RI setelah paket pengadaan langsung diumumkan oleh Pejabat Pengadaan pada <https://lpse.mahkamahagung.go.id/eproc4/>

E. Proses Pengadaan

1. Pembukaan Dokumen Penawaran : 20-12-2024
2. Evaluasi Dokumen Penawaran : 20-12-2024
3. Tes Kualifikasi : 20-12-2024

F. Penetapan Penyedia Jasa dan Penandatanganan SPK

1. Penetapan Penyedia Jasa : 23-12-2024
2. Penandatanganan SPK : 02-01-2025

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri Pulau Punjung



Fitri Yeni, S.H., M.H.

Pulau Punjung, 13 Desember 2024
Pejabat Pengadaan Jasa Posbakum
Pengadilan Negeri Pulau Punjung



Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., .S.H.